

TESIS

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP
DALAM PENYELESAIAN PERALIHAN FUNGSI LAHAN
SECARA ILEGAL**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Univeritas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh:

ILHAM FARIDUZ ZAMAN

NPM: 21310008

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2023

TESIS

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP
DALAM PENYELESAIAN PERALIHAN FUNGSI LAHAN
SECARA ILEGAL**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Univeritas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh:

ILHAM FARIDUZ ZAMAN

NPM: 21310008

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2023

TESIS

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP
DALAM PENYELESAIAN PERALIHAN FUNGSI LAHAN
SECARA ILEGAL**

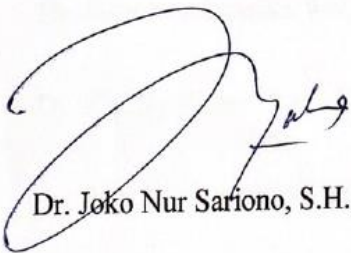
Diajukan oleh:

ILHAM FARIDUZ ZAMAN
NPM: 21310008

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
Tanggal 25 Mei 2023


Oleh

Pembimbing I



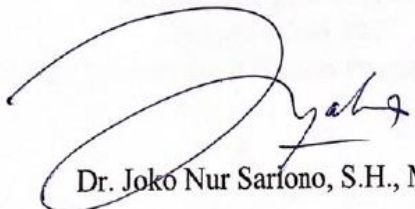
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Ria Tri Vinata, S.H., L.L.M.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.


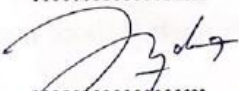
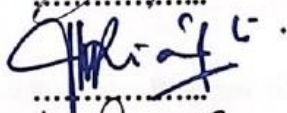
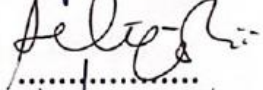
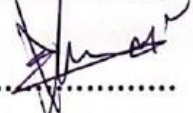
TESIS
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP
DALAM PENYELESAIAN PERALIHAN FUNGSI LAHAN
SECARA ILEGAL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

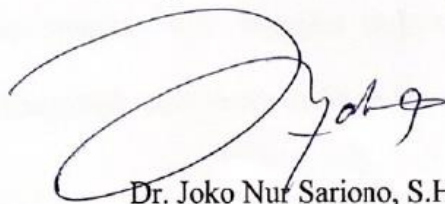
ILHAM FARIDUZ ZAMAN
NPM: 21310008

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 4 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Tanda Tangan
Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum. Ketua	
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. Anggota	
Dr. Ria Tri Vinata, S.H., L.L.M. Anggota	
Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H. Anggota	
Dr. Cita Yustisia Serfiani, S.H., M.H. Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister
Tanggal 4 Juni 2023
Ketua Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Dr. Joko Sariono, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
6. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., L.L.M. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan-arahan.
7. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberika dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.

8. Kepada mahasiswa Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2021 yang bersama-sama memberika energi positif sehingga tesis ini terselesaikan.
9. Kepada kedua orang tua penulis, istri, serta mertua penulis yang memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya,
Yang menyatakan,

Ilham Fariduz Zaman
NPM 082330736469

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Fariduz Zaman

NPM : 21310008

Alamat : Jl. Srenggahan Lebar No. 16, RT 001/RW 006

Sidodadi, Simokerto, Kota Surabaya

No. WA : 082330736469

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: "**Peran Pemerintah Daerah Kab. Sumenep Dalam Penyelesaian Peralihan Fungsi Lahan Secara Ilegal**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 14 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Ilham Fariduz Zaman
NPM 082330736469

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Teoritis.....	8
E.1 Konsep dasar tentang pemerintah daerah Kab. Sumenep	8
E.2 Penjelasan tentang peralihan fungsi lahan.....	15
E.3 Teori otonomi daerah	22
E.4 Penjelasan tentang peraturan daerah	27
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pertanggungjawaban.....	34

BAB II PERAN PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMENEP DALAM PENYELESAIAN PERALIHAN FUNGSI LAHAN SECARA ILEGAL	36
A. Analisis Peran Pemerintah Daerah Kab. Sumenep Dalam Penyelesaian Peralihan Fungsi Lahan Secara Ilegal.....	36
B. Prosedur Penyelesaian Peralihan fungsi lahan Secara Ilegal	52
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAB. SUMENEP NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013- 2033	59
A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kab. Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.....	59
B. Efektifitas Peraturan Daerah Kab. Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.....	59
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR BACAAN	

ABSTRAK

Peralihan fungsi lahan secara ilegal di Kab. Sumenep marak dilakukan, sedangkan pemerintah daerah Kab. Sumenep Kab. Sumenep selaku lembaga eksekutif tidak menjalankan perannya secara maksimal, sehingga tidak adanya kepastian hukum tentang penyelesaian peralihan fungsi lahan secara ilegal. Penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep Dalam Penyelesaian Peralihan fungsi lahan Secara Ilegal,”** ini menganalisa mengenai peran pemerintah daerah Kab. Sumenep Kab. Sumenep dalam penyelesaian peralihan fungsi lahan secara ilegal serta bagaimana implementasi peraturan daerah Kab. Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

Penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan dua pendekatan masalah, pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum *primer dan sekunder*. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, mengkaji dokumen, penelusuran internet, dan pengayaan literatur hukum.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah daerah Kab. Sumenep Kab. Sumenep saat terjadi peralihan fungsi lahan secara ILEGAL dapat dilakukan secara preventif dan/atau peran represif. penyelesaiannya dapat dilakukan dengan prosedur penyelesaian non yudisial dan/atau yudisial. Sedangkan implementasi peraturan daerah Kab. Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 masih kurang maksimal karena faktor infrastruktur politik dan suprastruktur politik.

Berdasarkan kondisi di atas, maka pemerintah daerah Kab. Sumenep Kab. Sumenep hendaknya membuat produk hukum berupa peraturan daerah tentang tata cara penyelesaian kasus peralihan fungsi lahan secara ilegal, serta membuat kebijakan pemberian sanksi serta pemberlakuan insentif ataupun disinsentif. Kedua, pemerintah daerah Kab. Sumenep untuk segera melakukan upaya perbaikan infrastruktur politik dan suprastruktur politik dengan cara mengadakan pendidikan politik dan peningkatan moralitas.

Kata kunci: Peran Pemerintah daerah Kab. Sumenep, Peralihan fungsi lahan, Implementasi Perda.

ABSTRACT

*Illegal land use conversion in Sumenep Regency has been rampant, while the local government of Sumenep as the executive body has not effectively fulfilled its functions, resulting in a lack of legal certainty regarding the resolution of illegal land use conversions. This research, entitled "**The Role of the Local Government of Sumenep Regency in Resolving Illegal Land Use Conversions**," analyzes the role of the local government of Sumenep Regency in resolving illegal land use conversions and the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2013 concerning the Spatial Planning of Sumenep Regency for the period 2013-2033.*

This research is a normative legal research. It uses two problem-solving approaches: the statute approach and the conceptual approach. The legal materials are obtained from primary and secondary legal sources. The legal materials are collected by examining legislation, studying documents, conducting internet searches, and enriching legal literature.

The results of this research find that the role of the local government of Sumenep Regency in cases of illegal land use conversion can be carried out through preventive and/or repressive functions. The resolution can be done through non-judicial and/or judicial procedures. Meanwhile, the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2013 concerning the Spatial Planning of Sumenep Regency for the period 2013-2033 is still not optimal due to political infrastructure and political superstructure factors.

Based on the above conditions, the local government of Sumenep Regency should create a legal product in the form of a regional regulation on the procedures for resolving cases of illegal land use conversion and establish policies for imposing sanctions as well as providing incentives or disincentives. Secondly, the local government should make immediate efforts to improve political infrastructure and political superstructure by conducting political education and enhancing morality.

Keywords: Role of the Local Government, Land Use Conversion, Implementation of Regional Regulation.